

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, persaingan dalam bidang ekonomi semakin lama cenderung semakin kuat. Setiap perubahan yang terjadi harus diperhitungkan dan diantisipasi. Demikian halnya dengan para pelaku ekonomi khususnya koperasi, terutama terhadap kinerja keuangan koperasi yang dituntut untuk cepat tanggap dalam mengambil keputusan untuk mencegah hilangnya peluang keuntungan yang ada atau sebaliknya akan mendatangkan kerugian bagi koperasi. Sehubungan dengan hal itu, koperasi harus tangguh dalam menghadapi perubahan dan persaingan yang terjadi di dalam lingkungan koperasi itu sendiri atau bersaing dengan lembaga keuangan bukan bank lainnya, baik secara nasional, regional, maupun internasional.

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan bukan kemakmuran orang seorang yang diutamakan dan bangunan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Peran koperasi sebagai salah satu sektor kekuatan ekonomi di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan demokrasi ekonomi rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain ingin mencapai tujuan dari koperasi seperti yang tercantum di atas, koperasi juga mempunyai fungsi dan peran didalam masyarakat. Fungsi dan peran yang dijalankan koperasi antara lain membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Pada awal perkembangannya, koperasi di Indonesia seringkali dipandang sebelah mata. Namun sekarang koperasi dapat dijadikan sebagai alternatif yang baik bahkan menjadi soko guru perekonomian nasional. Ini yang kemudian membuat masyarakat Indonesia berharap pada koperasi.

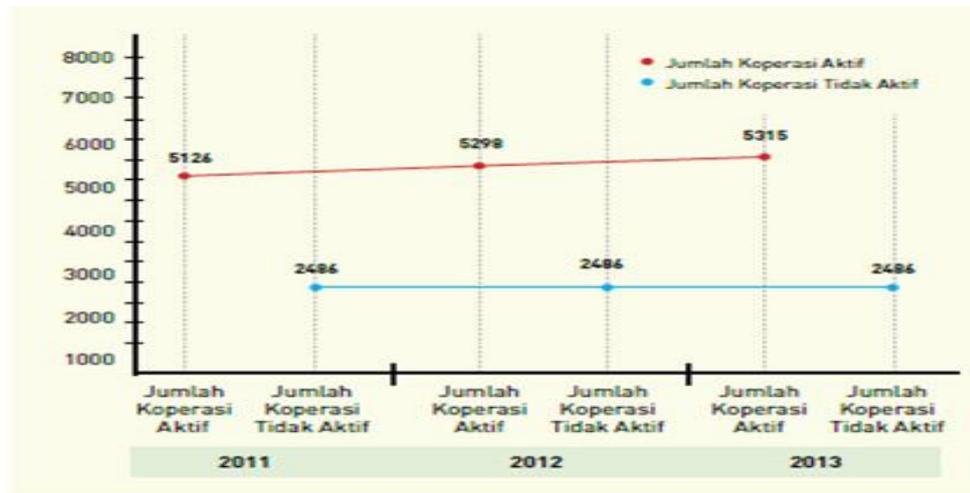
Tabel I.1
Provinsi yang memiliki koperasi terbanyak di Indonesia Tahun 2014¹

	Provinsi	Jumlah Koperasi
1	Jawa Timur	30.850
2	Jawa Tengah	27.784
3	Jawa Barat	25.563
4	Sumatera Utara	12.286
5	Sulawesi Selatan	8.556
6	DKI Jakarta	7.928
7	N. Aceh Darussalam	7.428
8	Banten	6.234
9	Sulawesi Utara	6.038
10	Sumatera Selatan	5.852

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa ke-10 provinsi tersebut merupakan provinsi yang memiliki jumlah koperasi terbanyak di Indonesia. Dari ke-10 provinsi tersebut DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki koperasi terbanyak. Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesarekonomi nasional. Hal tersebut dikarenakan karena penggerak ekonomi nasional di Provinsi DKI Jakarta mulai dari perusahaan nasional, perusahaan asing, pusat perbankan, hingga koperasi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, di Provinsi DKI Jakarta jumlah koperasi yang aktif mengalami peningkatan, sedangkan jumlah koperasi pasif tetap. Berikut grafik data koperasi menurut wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

¹ Kementerian Negara Koperasi dan UKM, *Data Koperasi 31 Desember 2014*, 2015, www.dekop.go.id/data-koperasi-31-desember-2014 (diakses pada 10 Oktober 2015, pukul 01.25 WIB).



Gambar I.1
Data Koperasi di DKI Jakarta Menurut Wilayah²

Berdasarkan gambar tersebut dapat terlihat bahwa koperasi yang aktif di provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah koperasi yang aktif berjumlah 5126 koperasi, tahun 2012 berjumlah 5298 koperasi, dan tahun 2013 berjumlah 5315 koperasi. Peningkatan jumlah koperasi dari tahun 2012 ke 2013 mengalami penurunan dibandingkan peningkatan jumlah koperasi tahun 2011 ke tahun 2012. Peningkatan jumlah tersebut menggambarkan bahwa kegiatan usaha koperasi sudah semakin diminati oleh masyarakat serta diiringi peningkatan jumlah sisa hasil usaha pada koperasi di DKI Jakarta.

Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta merupakan salah satu koperasi sekunder di DKI Jakarta yang aktif. PKPRI DKI Jakarta beranggotakan koperasi-koperasi primer di kalangan

² Pemerintah Daerah DKI Jakarta, *Data Koperasi di DKI Jakarta menurut Wilayah*, 2015, www.jakarta.go.id/bidang-koperasi (diakses pada tanggal 19 Mei 2015 pukul 23.40 WIB).

pemerintahan DKI Jakarta. PKPRI DKI Jakarta memiliki karakteristik aktivitas ekonomi yang unik yaitu didirikan, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya. Dalam karakteristik yang unik tersebut salah satu elemen yang ada didalamnya adalah biaya atau beban.

Agar koperasi dapat mewujudkan fungsi dan perannya, maka koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, dan juga harus mampu menghasilkan keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU) yang layak dan kontinuitas. Walaupun koperasi merupakan badan usaha yang semata-mata bukan mencari keuntungan, namun koperasi senantiasa berusaha mendapatkan SHU yang optimal untuk meningkatkan pembagian SHU anggotanya. Perolehan SHU mempengaruhi tingkat rentabilitas suatu badan usaha. Oleh karena itu laba yang optimal belum dapat dijadikan ukuran bahwa suatu badan usaha telah bekerja secara efisien, maka suatu badan usaha dalam menjalankan usahanya diarahkan untuk mendapatkan tingkat rentabilitas ekonomi yang optimal. Menurut John, rentabilitas ekonomi dapat ditunjukkan melalui perbandingan laba dengan modal atau bisa dijelaskan sebagai perbandingan antara laba yang dihasilkan pada setiap penjualan yang masuk ke dalam modal.³ Rentabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan modal yang dimiliki.

Bagi koperasi pada umumnya masalah rentabilitas menjadi penting, karena SHU yang besar belumlah merupakan ukuran bahwa koperasi tersebut bekerja dengan efisien dan efektif. Efisien dan efektif baru dapat diketahui

³ John, *Financial Statement Analysis (Analisis Laporan Keuangan)* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h.72.

dengan membandingkan laba atau SHU yang diperoleh dengan kekayaan yang menghasilkan SHU tersebut atau dengan kata lain menghitung rentabilitasnya.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta memiliki kinerja keuangan yang selalu meningkat secara fluktuatif mengenai sisa hasil usaha (SHU), modal koperasi, dan rentabilitas selama tahun 2010-2013.

Tabel I.2
Rentabilitas Ekonomi PKPRI DKI Jakarta Tahun 2010-2013⁴

	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Modal Koperasi (Rp)	Rentabilitas (%)	Kenaikan Rentabilitas (%)
2010	750.098.381	7.194.060.119	10,42	-
2011	1.097.130.581	7.988.231.198	13,73	3,31
2012	1.259.245.848	8.758.252.603	14,37	0,64
2013	1.365.759.025	9.492.050.935	14,38	0,01

Sumber : data yang diolah peneliti

Tabel I.2 menunjukkan bahwa dalam empat tahun, rentabilitas ekonomi PKPRI DKI Jakarta mengalami peningkatan. Peningkatan SHU dan modal mengakibatkan kenaikan rentabilitas. Dari tahun ke tahun rentabilitas mengalami peningkatan, tetapi tidak pada tahun 2012, persentase kenaikan rentabilitas mengalami penurunan sebesar 2,67% dibandingkan persentase kenaikan rentabilitas tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena Indonesia pada tahun tersebut mengalami guncangan ekonomi yang terjadi di pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global berdampak pula pada kinerja keuangan koperasi di Indonesia.

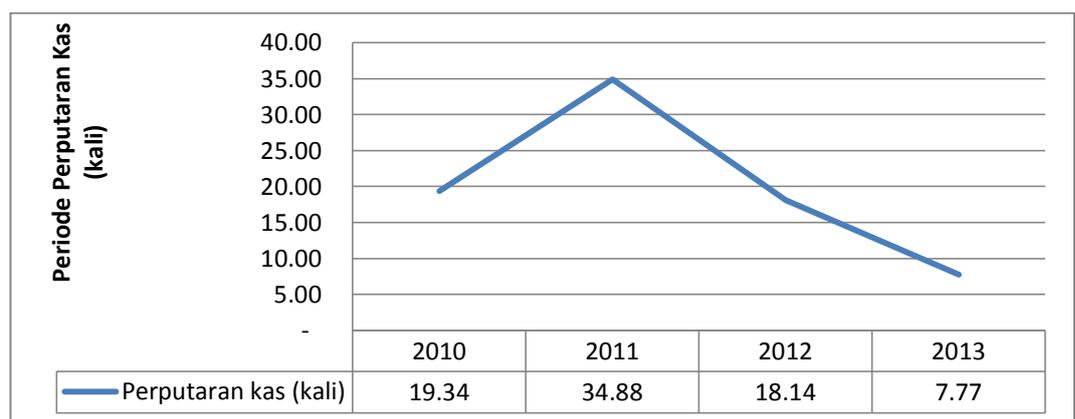
⁴ PKPRI DKI Jakarta, *Data Perkembangan PKPRI*, 2015, www.pkpridki.com/tentangkami/detail/data-perkembangan (diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 pukul 03.54 WIB).

Kinerja keuangan suatu koperasi terlihat dari aktivitasnya. Aktivitas koperasi seperti dalam sebuah perusahaan yang tidak terlepas dari efektifitas modal kerja. Modal kerja ialah aktiva lancar yang digunakan dalam kegiatan operasional dan selalu berputar dalam periode tertentu. Periode perputaran modal kerja dimulai dari saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi kas, sedangkan elemen modal kerja adalah semua aktiva lancar atau seluruh aktiva yang diharapkan dapat kembali menjadi bentuk asalnya dalam waktu satu tahun atau siklus kegiatan normal usaha. Hal ini berarti bahwa yang perlu diperhatikan dalam modal kerja ialah kas, piutang, dan persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran modal kerja, maka semakin cepat waktu pengembalian atas modal yang telah diinvestasikan.

Modal kerja dalam koperasi selalu berputar. Perputaran modal kerja diharapkan terjadi dalam waktu yang relatif pendek, sehingga modal yang ditanamkan dalam koperasi akan cepat kembali. Tingkat perputaran yang tinggi akan mengakibatkan laba (SHU) koperasi juga tinggi dan laba yang tinggi akan mempengaruhi tingginya tingkat rentabilitas koperasi yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, komponen modal kerja tersebut dibatasi hanya untuk kas dan piutang.

Dalam pengelolaan kas sering terjadi adanya pengangguran uang kas yang berlebihan. Uang kas yang tersedia tidak dipergunakan secara maksimal untuk kegiatan operasi, sehingga mengurangi tingkat laba yang diharapkan dapat tercapai pada periode berjalan. Dengan mengetahui

tingkat perputaran kas, maka dapat dikatakan penggunaan modal kerja dalam kas yang bersangkutan. Perputaran kas yang lambat, terjadi inefisiensi penggunaan kas, yang berarti tidak mendukung rentabilitas ekonomi. Dan sebaliknya, perputaran kas yang cepat atau tinggi akan terjadi efisiensi dalam penggunaan kas, yang berakibat mendukung upaya koperasi untuk mendapatkan rentabilitas ekonomi. Supaya rentabilitas ekonomi, perusahaan atau koperasi harus beroperasi secara efisien termasuk penggunaan asset koperasi yang harus efisien. Berikut adalah gambar tingkat perputaran kas pada PKPRI DKI Jakarta.



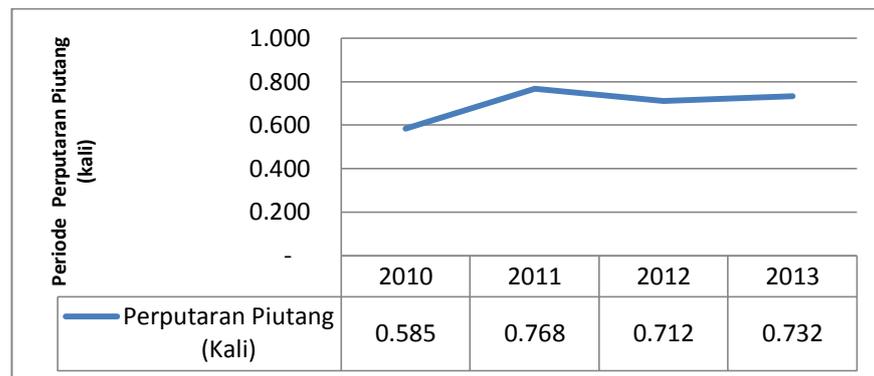
Gambar I.2
Tingkat Perputaran Kas PKPRI DKI Jakarta Tahun 2010-2013⁵

Gambar I.2 menunjukkan tingkat perputaran kas pada PKPRI DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010-2011 terjadi peningkatan perputaran kas, tetapi tahun 2012 hingga tahun 2013 perputaran kas yang terjadi di PKPRI mengalami pelemahan. Hal tersebut

⁵ PKPRI DKI Jakarta, *Data Perkembangan PKPRI*, 2015, www.pkpridki.com/tentangkami/detail/data-perkembangan (diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 pukul 03.54 WIB)

terjadi karena adanya pengangguran uang kas yang berlebihan. Sehingga semakin lama periode terkaitnya modal kerja dalam kas.

Piutang sebagai bagian dari modal kerja, keberadaannya akan selalu berputar, dalam arti piutang itu akan tertagih pada saat tertentu. Periode perputaran piutang tergantung pada panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Sehingga semakin lama syarat pembayaran kredit berarti semakin lama terikatnya modal kerja dalam piutang. Sebaliknya semakin pendek syarat pembayaran kredit berarti semakin pendek tingkat terikatnya modal kerja dalam piutang. Dengan mengetahui tingkat perputaran piutang, maka akan diketahui tingkat modal kerja yang tertanam dalam piutang. Tingkat perputaran piutang dapat menghasilkan SHU dalam jumlah yang besar dan juga dapat meminimalkan biaya. Besarnya SHU yang diterima akan mempertinggi tingkat rentabilitas ekonomi. Maka tingkat perputaran piutang akan mempengaruhi rentabilitas ekonomi. Berikut adalah gambar tingkat perputaran piutang pada PKPRI DKI Jakarta.



Gambar I.3
Tingkat Perputaran Piutang PKPRI DKI Jakarta Tahun 2010-2013⁶

Gambar I.3 menunjukkan tingkat perputaran piutang pada PKPRI DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 terjadi peningkatan perputaran kas, tetapi tahun 2012 perputaran piutang yang terjadi di PKPRI mengalami pelemahan. Hal tersebut terjadi karena semakin pendek tingkat terikatnya modal kerja dalam piutang. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 0,73 kali.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka dikemukakan identifikasi masalah yang dapat mempengaruhi rentabilitas ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh perputaran modal kerja terhadap rentabilitas ekonomi di PKPRI DKI Jakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh perputaran kas terhadap rentabilitas ekonomi di PKPRI DKI Jakarta?

⁶ PKPRI DKI Jakarta, www.pkpri-dki.com/tentangkami/detail/data-perkembangan (diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 pukul 03.54 WIB)

3. Apakah terdapat pengaruh perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi di PKPRI DKI Jakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh perputaran kas terhadap sisa hasil usaha di PKPRI DKI Jakarta?
5. Apakah terdapat pengaruh perputaran piutang terhadap sisa hasil usaha di PKPRI DKI Jakarta?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada, peneliti akan membatasi penelitian pada pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta Tahun 2010-2013.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang dirumuskan adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh perputaran kas terhadap rentabilitas ekonomi di PKPRI DKI Jakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi di PKPRI DKI Jakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh perputaran kas dan piutang terhadap rentabilitas ekonomi di PKPRI DKI Jakarta?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini baik secara teoretis maupun praktis mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perputaran kas dan piutang yang mempengaruhi rentabilitas ekonomi pada koperasi. Selain itu, sebagai sarana pengembangan diri dalam membuat karya tulis ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi anggota-anggota PKPRI DKI Jakarta, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi mengenai perputaran kas dan perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi sehingga dalam mengelola tingkat kas dan piutang dapat lebih efisien dan efektif.

b. Bagi PKPRI DKI Jakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kinerja masing-masing koperasi yang menjadi anggota PKPRI melalui analisa laporan keuangan koperasinya.

c. Bagi Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan mampu memberikan bahan referensi penelitian lain terutama pengaruh perputaran kas dan piutang terhadap rentabilitas ekonomi.